

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu negara tentulah dikatakan maju apabila kesejahteraan masyarakatnya terjamin dengan baik, kesejahteraan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan menjamin pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat stabil serta mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri (Santoso & Nurmalina, 2017). Pihak yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat ini salah satunya adalah pemerintah, dimana pemerintah pada suatu negara harus memiliki peran yang aktif dalam meningkatkan serta mempertahankan pendapatan masyarakat karena ini bisa mempengaruhi keberlangsungan kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Adanya pendapatan yang stabil dari masyarakat secara langsung dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan pendapatan, secara sederhana apabila pendapatan masyarakat stabil maka apa yang masyarakat berikan pada negara berupa pajak dan retribusi tidak akan terhambat, serta pemerintah pun nantinya bisa membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa kekurangan.

Secara konseptual pemerintah yang baik adalah pemerintah yang profesional, yaitu pemerintah yang cekatan dalam memberikan pelayanan, netral, akuntabel, aspiratif dan dalam menjalankan tugasnya selalu didasarkan pada etika. Jika dilihat secara dasar bahwa pemerintah akan adil kepada masyarakat jika bersikap netral, artinya pemerintah seharusnya bertindak sebagaimana mestinya dengan mengedepankan tanggung jawab kelembagaan yang berorientasi pada pencapaian dengan memupuk efektifitas dan efisiensi dalam setiap langkah kegiatan.

Efektifitas pada suatu pemerintahan tentulah menjadi keharusan dimana hal ini akan membuat apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak sia-sia, sesuai dengan rencana dan maksimal pada pencapaian (Nurfadillah, 2021). Adapun efisiensi menjadi tolak ukur apakah pendanaan yang dialokasikan mampu mendanai secara menyeluruh, dalam hal ini melihat apakah yang dilakukan oleh pemerintah hemat untuk merealisasikan anggaran, karena pencapaian program tentu perlu

memperhatikan anggaran yang dipergunakan (Wirman, 2012).

Efektifitas dan efisiensi suatu kebijakan tentulah tidak akan terlaksana apabila tidak ada strategi kebijakan yang mempunyai, hal tersebut dikarenakan strategi berperan penting dalam menentukan berbagai tahapan dalam menyusun sasaran serta menjalankan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi (Hasyim et al., 2014). Setiap daerah memiliki isu-isu yang bervariasi hal tersebut tergantung permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerahnya itu sendiri, pemerintah tidak bisa membuat sebuah rencana apabila tidak memperhatikan sasaran apa saja yang akan dicapai pada periode tertentu, tentulah berbagai sasaran ini harus merupakan isu utama yang menghambat perkembangan suatu daerah serta bisa direalisasikan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Pada tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon memiliki delapan sasaran strategi dimana penyusunan sasaran tersebut berpedoman pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time bond, dan Continuously improve*). Kriteria ini dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa sasaran strategis haruslah spesifik atau jelas, memiliki tolak ukur yang jelas, dapat direalisasikan atau masuk akal, layak atau sesuai dengan permasalahan yang

dihadapi, memiliki batasan waktu serta ada tindak lanjut kedepannya atas sasaran yang dibuat. Keseluruhan sasaran tersebut mencapai predikat "sangat baik" pada pelaksanaannya dan hanya satu yang tidak diketahui predikatnya karena tidak ada indikator yang bisa dijadikan acuan pencapaian sehingga dihapus dengan Surat Keterangan. Adapun anggaran yang digunakan terdapat efisiensi sekitar Rp. 2.067.914.508,-, dimana efisiensi dari tujuh program mencapai 100%, sedangkan satu program tidak bisa diukur tingkat efisiensinya (*LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon*, 2021). Salah satu sasaran dari kinerja yang dilakukan SEKDA Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan koordinasi bidang ekonomi dengan indikator peningkatan pendapatan perkapita, dimana anggaran yang dipersiapkan adalah Rp. 3.042.545.050,00 dengan target pencapaian 80%. Peningkatan ekonomi masyarakat tentulah menjadi hal yang sentral pada suatu daerah, karena dengan meningkatnya ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, daerah tersebutpun akan semakin pesat perkembangannya (Rizky Indah et al., 2013). Begitu Pula dengan Kabupaten Cirebon yang membuat kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia ialah 62,2 jt, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan sepuluh tahun kebelakang maka mengalami kenaikan pendapatan. Kenaikan yang terjadi tentulah tidak hanya peran dari masyarakat saja, namun peran pemerintah juga krusial, dimana memfasilitasi berbagai usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti menyalurkan berbagai bantuan yang mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha masyarakat, lalu ada pembangunan industri yang mana hal

ini dapat menyerap tenaga kerja, selama 2021 penyerapan terjadi sebanyak 1,2 juta tentu ini akan meningkatkan jumlah tenaga kerja industri serta meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia. Akan tetapi nilai secara nasional ini belum tentu merata pada setiap daerahnya, akan selalu ada ketimpangan di daerah terpencil, selain faktor daerah, kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah pun menjadi suatu penentu dalam keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat ini.

Pada pelaksanaan di lapangan khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah, pendapatan menjadi hal yang serius dan perlu diperhatikan. Seperti yang dilansir dari situs resmi pemerintah Kabupaten Cirebon yakni cirebonkab.go.id disinggung pula perihal masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian serius Pemkab bahkan Bupati hingga SEKDA turut turun tangan langsung ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terkait hal tersebut. Wakil Bupati Kabupaten Cirebon mengatakan “Pemkab akan terus melakukan monitoring dan intervensi dalam program penanggulangan kemiskinan” (cirebonkab.go.id), hal tersebut menjadi hal yang serius yang akan ditangani oleh Pemkab Cirebon ke depan. Tidak hanya itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon juga menyinggung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang diduga tidak tersinkronisasi dengan benar. Pemkab Cirebon juga meminta jajarannya untuk terus melakukan percepatan pembuatan KTP dan pemutakhiran data. Dari informasi yang didapat tersebut, senada dengan LAKIP yang sebelumnya dipaparkan dan pada sasaran strategis koordinasi bidang ekonomi dapat diartikan masih memiliki permasalahan yang

cukup signifikan sehingga hal tersebut belum terealisasi secara maksimal. Salah satu faktor penting agar terlaksana suatu program pemerintah` adalah adanya budaya pelaksanaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau pengguna jasa. Karena itu pemerintah daerah harus merespon keinginan dan harapan pengguna jasa. Untuk itu pelayanan publik di daerah perlu memperhatikan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, tingkat kepuasan masyarakat serta evaluasi kebijakan yang telah diterapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berikut laporan yang mengenai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon di tahun 2021:

Tabel 1.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya koordinasi bidang Pendidikan	Prosentase tingkat ketercapaian target RLS	80%	80,60%	100,75%
2	Meningkatnya koordinasi bidang Kesehatan	Prosentase ketercapaian angka harapan hidup	80%	82,04%	102,55%
3	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi	Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat	80%	75,09%	93,87%
4	Meningkatnya koordinasi keagamaan	Prosentase peningkatan koordinasi dalam penurunan angka friksi antar dan internal umat beragama	100%	200%	200%

5	Meningkatnya koordinasi penurunan pekat	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	81%	-	-
6	Meningkatnya implementasi jumlah kebijakan pemerintah daerah	Prosentase jumlah perda dan perkada yang diimplementasikan	62%	466,34%	752,16%
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	1 laporan	1 laporan	100%
8	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat	3.260 poin	3.342 poin	102,50%

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 bisa terlihat ada delapan jenis urusan pemerintahan yang masing-masing memiliki sasaran strategis dan terdapat satu indikator kinerja disetiap sasaran strateginya. Urusan pemerintah terkait tingkat ketercapaian target pada bidang pendidikan ditetapkan target 80%, dengan realisasi 80,60% dan capaian sebesar 100,75%. Peningkatan bidang kesehatan ketercapaian angka harapan hidup diperoleh target 80%, realisasi 82,04%, dan capaian 102,55%. Presentase peningkatan pendapatan masyarakat diperoleh target yakni 80%, dan realisasi 75,09%, dan capaian diperoleh 93,87%. Untuk koordinasi bidang keagamaan dengan fokus penurunan angka friksi antar dan internal umat beragaman ditargetkan angka 100%, dengan realisasi 200, dan memperoleh capaian 200%.

Presentase penurunan penyakit pada masyarakat ditetapkan target 81%, dan tidak adanya realisasi karena perubahan kebijakan, sedangkan presentase implementasi kebijakan pemerintah daerah diperoleh target 62%, realisasi 466,34% dan capaian 752,16%. Presentase kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah berupa laporan ditetapkan target 1 laporan, dan realisasi 1 laporan, sehingga capaian tercatat 100%. Presentse kualitas administrasi pemerintahan daerah dengan adanya Indeks Keupasan Masyarakat (IKM) diperoleh target 3.260 poin, dengan realisasi 3.342, dan capaian 102,50%. Maka dapat diketahui dari data tersebut (meningkatnya koordinasi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, penurunan pekat, implementasi kebijakan pemerintah daerah, kualitas kinerja penyelenggara pemda, dan kualitas administrasi pemerintah daerah) memiliki capaian diatas target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk urusan pemerintah pada aspek prosentase peningkatan pendapatan masyarakat memiliki realisasi dibawah target yang telah ditentukan. Khususnya pada koordinasi bidang ekonomi, meskipun memiliki predikat sangat baik pada capaiannya, akan tetapi hanya tercapai 75,09% dari target yang semestinya 80%, karena realisasi peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten cirebon pada tahun 2021 adalah Rp.22.833.000,00 sedangkan untuk targetnya adalah Rp. 24.323.600,00. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 maka terjadi kenaikan pencapaian kinerja, berikut perbandingan pencapaian tahun 2021 dengan 2020.

Tabel 1.0.2 Prosentasi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kab.Cirebon

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020 Kondisi Awal	Tahun 2021 Target	% Capaian
1	Prosentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Rp 21.869.000	Rp 22.833.000	95,77

Sumber LAKIP Tahaun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Peningkatan pendapatan di Kabupaten Cirebon menurut data di atas memang belum memiliki realisasi yang diinginkan. Analisis berkaitan dengan sasaran strategis pada bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan harus dilihat secara matang, guna mengevaluasi sasaran strategis yang nantinya bermanfaat luas dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Evaluasi sasaran strategis ini merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan yang objektif berkaitan dengan data berkaitan pendapatan masyarakat, yang telah disusun secara sistematis, dan empiris terhadap efek dari sasaran dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis merupakan suatu penjabaran dari berbagai tujuan yang telah dirumuskan yang terdapat pada suatu kebijakan akan tetapi waktu yang diperlukan dalam mencapainya lebih singkat daripada pencapaian tujuan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022).

Kekurangan pencapaian dalam merealisasikan sasaran strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tentulah sebuah masalah serta harus dievaluasi apakah sasaran tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yakni *SMART-C*. Selain itu, masih ada beberapa kekurangan yang perlu dihilangkan untuk meningkatkan pencapaiannya. Oleh karenanya peneliti tertarik dalam

melakukan pembahasan berkenaan dengan “**Implementasi Kriteria SMART-C Pada Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut maka dapat ditarik permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yakni, upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang belum terlaksana secara maksimal karena sasaran strategis pada bidang ekonomi belum mencapai target di tahun 2021, sehingga harus diketahui bagaimana implementasi serta berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan rencana strategis yang disusun berdasarkan kriteria *SMART-C*, dan mempertahankan progres yang berjalan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 pada kebijakan bidang ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kriteria *specific* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?;
2. Bagaimana implementasi kriteria *measurable* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?;
3. Bagaimana implementasi kriteria *achievable* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?;
4. Bagaimana implementasi kriteria *relevant* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?;
5. Bagaimana implementasi kriteria *time bond* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?; dan

6. Bagaimana implementasi kriteria *continuously improve* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang bisa dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kriteria *specific* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
2. Bagaimana implementasi kriteria *measurable* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
3. Bagaimana implementasi kriteria *achievable* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
4. Bagaimana implementasi kriteria *relevant* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
5. Bagaimana implementasi kriteria *time bond* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021; dan
6. Bagaimana implementasi kriteria *continuously improve* pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Peneliti diharapkan dapat memahami secara keseluruhan dan juga bagian dari penambahan wawasan terkait kriteria sasaran strategis berdasarkan *SMART-C* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, penelitian inipun

bagian dari memberi sumbangsih pemikiran dalam segi keilmuan dengan demikian bisa menjadi tambahan literatur bagi para pembaca. Oleh karena itu juga hasil dari peneliti ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dan teori yang berkenaan dengan Kriteria sasaran strategis suatu instansi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk semua lapisan khususnya pegawai birokrasi serta para petinggi birokrat lainnya guna dijadikan bahan evaluasi dengan melakukan perbaikan perbaikan agar mengetahui kekurangan dan kelemahan terkait sasaran strategis dimasa ini untuk masa yang akan datang lebih baik lagi.

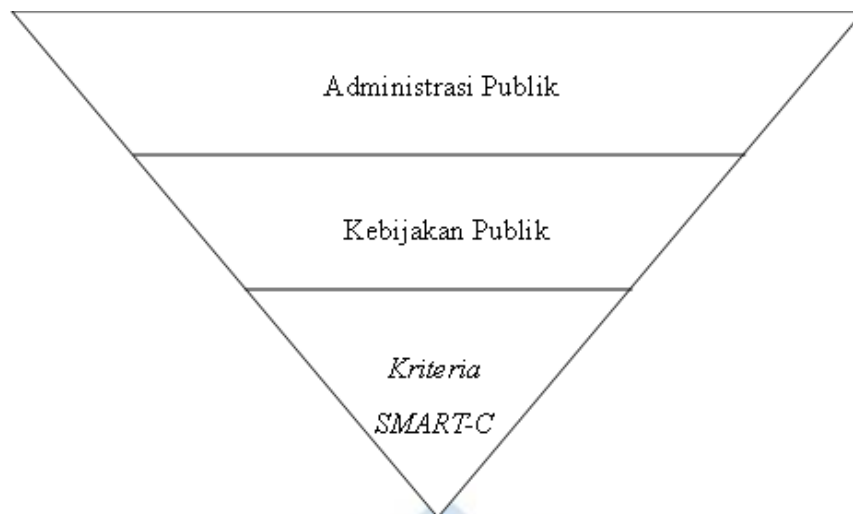
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi para pegiat literasi. Selanjutnya sebagai salahsatu referensi atau bisa jadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.



F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep segitiga terbalik. Pada hal ini yang dijelaskan dari mulai yang umum hingga mengerucut kepada pembahasan khusus atau jika dijabarkan mulai dari *grand theory* yaitu Administrasi Publik kemudian *middle theory* Kebijakan Publik dan yang terakhir adalah *appailed theory* yaitu Kriteria Sasaran Strategis SMART-C.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Administrasi secara teratur ditafsirkan sebagai tindakan administrasi atau pencatatan, dan pada saat yang sama definisi yang sejalan dengan Anggara (2016) dijelaskan pula bahwa administrasi merupakan prosedur berurusan dengan seluruh kegiatan perusahaan bisnis yang diarahkan pada pemenuhan tujuan dan capaian (mimpi dan tujuan). Pada saat yang sama dengan manajemen publik dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan yang dilakukan melalui cara dari banyak manusia atau perusahaan yang sedang membutuhkan pusat dan infrastruktur sebagai cara untuk membantu pemenuhan impian organisasi.

Ruang lingkup pandangan liputan publik bisa amat luas, karena melingkupi berbagai bidang dan sektor, khususnya ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Sebaliknya, hierarki peraturan publik dapat bersifat nasional, daerah, ataupun lokal, termasuk undang undang, peraturan otoritas, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan otoritas lokal/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota metropolitan dan keputusan bupati/walikota. Adapun Carl J

Federick yang telah diambil melalui (Agustino, 2008) menguraikan bahwa setiap kegiatan administrasi pasti ada hambatan (kesulitan) dan kemungkinan dalam pelaksanaannya suatu kebijakan bisa menghasilkan suatu yang positif atau negatif. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa konsep sebab akibat adalah bagian penting dari definisi cakupan, karena fakta pada akhirnya perlu menampilkan apa yang benar benar telah terjadi. Solichin Abdul Wahab menyarankan bahwa saat ini para ahli harus memerhatikan beberapa hal terkait dengan kebijakan. Guna mengerti istilah politik (Abdul Wahab, 2008) menyatakan pedoman yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan perlu dibedakan dari pengambilan keputusan
2. Kebijakan tidak akan selalu bisa dibedakan dari manajemen
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan
4. Kebijakan Tidak Mencakup Tindakan Atau Tidak Adanya Tindakan
5. Sebuah kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang harus dicapai
6. Semua kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, baik tergambar tegas maupun tidak
7. Politik terbentuk dari proses yang berlanjut dari waktu ke waktu
8. Kebijakan ini mencakup hubungan antar dan intra-organisasi
9. Kebijakan Publik Yang Berkaitan dengan Peran Penting, Meskipun Tidak Eksklusif, Peran Lembaga Negara
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Dengan demikian menurut Nugroho, terdapat dua ciri kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, karena maknanya

adalah halhal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan telah diambil.

Berdasarkan pendapat berbagai pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik atau untuk kepentingan umum. Kebijakan melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat mengikat dan koersif yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana kemajuan program mereka dan menunjukkan faktor apa yang dapat dimanipulasi untuk mencapai hasil yang baik, dan memberikan alternatif terhadap kebijakan baru atau hanya cara implementasi lainnya. Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa, informasi yang diperoleh dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program-program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program-program ke depan. Jika hasil evaluasi program menunjukkan bahwa perubahan program diperlukan, pengambil keputusan harus menganggap ini serius. Itu berarti memunculkan ide-ide baru untuk memperbaiki

program sehingga dapat menghindari kegagalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam *Grand Theory*, peneliti menggunakan teori (Paslong, 2014) yang menyatakan bahwa administrasi publik harus menjadi sistem bagi individu atau kelompok lembaga untuk secara efisien dan efektif melaksanakan tugas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan publik.

Pada *Middle Range Theory*, peneliti menggunakan teori Karl Friedrich. Politik adalah seperangkat tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan dan peluang untuk kebijakan yang diusulkan. Mengatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Agustino, 2008)

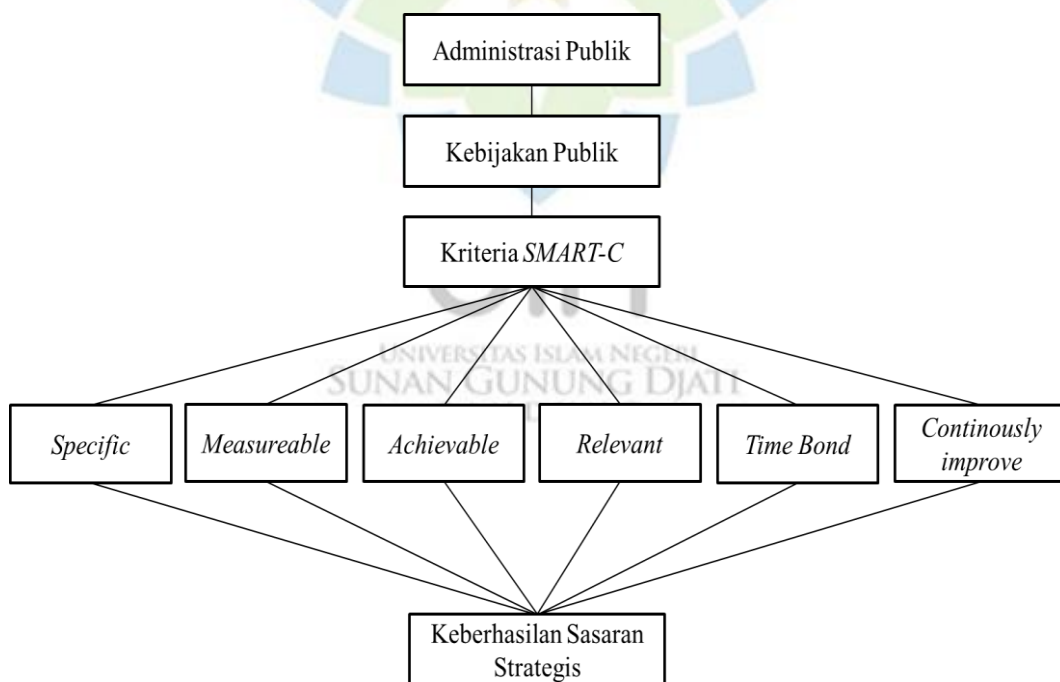
Dalam *Applied Theory*, Kriteria Sasaran Strategis *SMART C*. *SMART C* adalah pengembangan dari teori (George C & Edwards III, 2003) yang mana dibuat untuk membantu memformulasikan tujuan sehingga bisa dicapai (William N. Dunn, 2015) adapun penambahan unsur *C* merupakan bentuk penyesuaian yang terdapat pada Permenpan RB No. 55 Tahun 2011 tentang kriteria *SMART- C* (Rizky Indah et al., 2013). *SMART C* ini merupakan singkatan yang mana dipergunakan guna memaksimalkan pengukuhan maksud dan tujuan di dalam suatu kegiatan, terlebih jika hal tersebut memiliki hubungan dengan manajemen/mengatur suatu proyek, promosi pemasaran, manajemen performa kinerja, dan *self development*, berbagai sumber menggunakan berbagai huruf ini guna menunjukkan sesuatu hal berbeda, oleh karenanya, biasanya akan menemukan berbagai macam di antara berbagai versi *SMART*.

Akan Tetapi, kriteria *SMARTC* dipahami secara luas dengan hal yang berkenaan dengan:

1. *Specific* (Spesifik): Maksud dan tujuan yang memiliki sifat yang umum tidak cukup. Oleh karenanya, dalam menentukan berbagai tujuan harus terperinci serta jelas dan tidak membingungkan mengenai apa saja yang akan diperoleh. karenanya harus difikirkan tentang berbagai pertanyaan yang mana diawali dengan huruf "w": *who* (siapa), *what* (apa), *when* (kapan), *which* (yang mana), dan *why* (mengapa).
2. *Measurable* (Terukur): dalam menentukan tujuan yang memenuhi kriteria spesifik haruslah memiliki suatu indikator yang dapat digunakan guna mengukur serta menilai berbagai progress dalam memperoleh tujuan ini.
3. *Achievable* (Dapat Dicapai): memahami serta mengetahui apakah berbagai tujuan yang dirumuskan diyakini bisa dicapai dengan menimbang waktu, usaha, dan biaya dengan manfaatnya, serta prioritas lainnya yang mungkin dimiliki. kita juga harus memikirkan tentang apa yang dibutuhkan guna memperoleh tujuan yang dimaksudkan, serta apakah memiliki instrumen guna membantu atau keterampilan yang memang dibutuhkan.
4. *Relevant* (Relevan): Memahami hubungan yang sesuai dengan tujuan di dalam suatu organisasi secara lebih luas pun amat diperlukan. Berbagai strategi tentu haruslah sesuai dengan visi misi serta berbagai sasaran yang ditetapkan.
5. *Time bound* (Berkas Waktu): Waktu merupakan segalanya dalam menentukan suatu tujuan. Kita perlu menetapkan tanggal target/sasaran

serta mengajukan dan merumuskan pertanyaan spesifik berkenaan dengan hal yang dapat diperoleh dalam rentan waktu yang ditentukan. oleh karenanya amat penting guna memastikan bahwa batas waktu itu bisa dicapai, akantetapi juga mampu menyesuaikan. walau demikian rasa keperluan yang mendesak itu penting, memperoleh sebuah tujuan denan terburu buru itu kecil kemungkinannya dapat memberikan keuntungan terhadap pihak berkepentingan dan organisasi secara universal.

6. *Continously Improve* (Berkelanjutan): berbagai pengukuran yang terdapat pada sebuah strategi haruslah berkelanjutan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan pada pemerintahan.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran